

Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

G.YULIA NOVITA SARI¹; Satria Tri Nanda²; Ika Berty³; Raisya Zenita⁴

^{1,2,3} Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

⁴ Universitas Riau

Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581

E-mail : satriatrinanda@unilak.ac.id (korespondensi)

Submit : 2021-12-24

Review : 2021-01-12

Publish : 2022-01-26

Abstract: Evaluation of local government performance is an effort made to ensure that the implementation of local government governance has been carried out effectively. One of the measuring tools that can be used in the process of evaluating local government performance is value for money. Value for money is the concept of managing public sector organizations based on economic, efficiency and effectiveness. This study used a descriptive method to analyse the performance of the Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru (Pekanbaru Health Office) by using the concept of Value for Money. By using data from 2018 to 2020, this study tried to analyse the performance of the Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru (Pekanbaru Health Office) in terms of economic, efficiency and effectiveness elements. The results of the analysis show that in terms of economic ratios, for the last three years the Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru (Pekanbaru Health Office) has had an economical performance. However, for the last three years, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru (Pekanbaru Health Office) has experienced a decrease in efficiency and fluctuations in effectiveness performance from year to year. This is because several programs have had to postpone their implementation or reduce their budget due to budget refocusing related to the COVID-19 pandemic.

Keywords: *Value For Money*

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus pemerintahan, dan kepentingan masyarakatnya. Untuk memastikan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah telah terlaksana secara efektif dan efisien, diperlukan suatu system pengelolaan keuangan yang baik dan reliabel. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintahan, dibutuhkan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan system pengelolaan keuangan tersebut. Salah satu cara dalam mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan negara dan pengelolaan keuangan negara adalah dengan menggunakan konsep *Value for Money*.

Value for Money menurut (Mardiasmo, 2009) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi pemerintah dalam bidang kesehatan, instansi ini setiap tahunnya menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja yang nantinya akan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan dana yang diberikan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Untuk dapat menjalankan seluruh kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru memiliki anggaran pendapatan sebagai pemasukan instansi dan anggaran belanja sebagai pengeluaran instansi. Berikut merupakan data

anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Dinas kesehatan Kota Pekanbaru:
Tabel 1. Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 – 2020 Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Pencapaian%
1.	2018	Rp. 217.038.879.517	Rp. 179.106.143.235	82,52%
2.	2019	Rp. 176.170.519.490	Rp. 107.046.504.971	60,76%
3.	2020	Rp. 195.721.349.640	Rp. 140.410.380.021	71,74%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat pencapaian realisasi APBD dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan tersebut disebabkan salah satunya yaitu tidak terlaksananya program kerja pemerintah yang telah dianggarkan yang diakibatkan adanya kendala-kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), pencairan dana dan permasalahan lainnya. Pada 2020 pencapaian realisasi mengalami kenaikan dimana kenaikan tersebut terjadi karena adanya program-program yang dianggarkan pemerintah pusat dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang terjadi hampir diseluruh dunia salah satunya di Indonesia sehingga pemerintah gencar melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencegah dan menanggulangi Covid-19 dengan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) pada Dinkes Kota Pekanbaru.

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan anggaran yang dipersiapkan pemerintah pusat untuk membiayai seluruh program dan kegiatan pada masa pandemi Covid-19, besarnya anggaran DAK tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 12.679.805.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.238.473.156 atau sebesar 49,20%. Dana alokasi khusus non fisik diperuntukkan untuk kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK), akreditasi puskesmas, jaminan persalinan dan dukungan manajemen BOK kabupaten dan kota dan distribusi obat dan E-Logistik. Tidak tercapainya seluruh anggaran pada tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19 yang menyebabkan terkendalanya seluruh

kegiatan pada Dinkes Kota Pekanbaru. Tidak tercapainya realisasi anggaran menunjukkan adanya kinerja pemerintahan yang kurang efisien dan efektif dimana sebaiknya realisasi harus mencapai anggaran yang telah ditetapkan.

Penilaian kinerja sangat penting gunanya untuk mengetahui apakah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru telah merealisasikan program kerjanya dengan baik. Terutama realisasi terhadap program-program yang secara langsung manfaatnya berhubungan dan dirasakan oleh masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru merupakan instansi yang aktivitasnya berhubungan langsung dengan seluruh lapisan penduduk dan induk dari keberhasilan kinerjanya berasal dari tingkat kepuasan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan. Dengan menggunakan analisis *Value for Money* dapat dilihat seberapa besar persentase efisiensi dan efektifitas atas pencapaian target pendapatan dan biaya dengan membandingkan target dan realisasi sebagai alat pengukuran kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Penelitian mengenai analisis kinerja pemerintah dengan menggunakan *Value for Money* telah cukup banyak dilakukan pada banyak pemerintahan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Oktafiani (2021) misalnya, melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan sector public pada RSUD Brebes dengan konsep *Value for Money*. Hasil analisis menunjukkan bahwa RSUD Brebes telah mampu mencapai kinerja yang sangat ekonomis dan sangeet efisien. Febrianita, Utomo dan Musviyanti (2019) juga

melakukan analisis terhadap kinerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dengan *Value for Money*. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat inefisiensi dan inefektivitas atas pencapaian target pendapatan dan biaya.

Penelitian analisis *Value for Money* juga dilakukan oleh Yosie Dwinanda (2018) di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dengan hasil yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pada tahun 2013 sampai dengan 2017 menunjukkan kinerja yang ekonomis, efisiensi, efektivitas.

Penelitian mengenai analisis kinerja pemerintah menggunakan *Value for Money* juga dilakukan oleh Fitriani (2017), yang melakukan analisis kinerja dengan *Value for Money* pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba telah berlangsung efisien, efektif dan ekonomis.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena yang di ungkapkan, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penelitian ini dilakukan pada Dinas kesehatan Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk menganalisis pencapaian kinerja keuangan Dinkes Kota Pekanbaru, terutama dalam pemenuhan pelayanan masyarakat pada era sebelum dan saat pandemi COVID 19. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat ekonomis, efektivitas dan efisiensi kinerja Dinkes Kota Pekanbaru dalam pengelolaan keuangan.

Kinerja Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas

yang terukur. Menurut (Bastian, 2010) sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan agar membantu manajer publik menilai alat ukur finansial dan nonfinansial. Kinerja keuangan sebagai penentu tolak ukur yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam memperoleh pendapatan. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Handoko, 2016).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah hasil dari evaluasi terhadap kegiatan atau program yang digunakan sebagai salah satu ukuran untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Menurut (Bastian, 2010) indikator kinerja berguna sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas/ program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator setiap organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Peran indikator kinerja bagi pemerintah antara lain:

1. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi
2. Untuk mengevaluasi target akhir (*final outcome*) yang dihasilkan
3. Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial
4. Memungkinkan bagi pemakai jasa pelayanan pemerintah untuk melakukan pilihan
5. Untuk menunjukkan standar kinerja
6. Untuk menunjukkan efektivitas
7. Untuk membantu menunjukkan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran
8. Untuk menunjukan wilayah, bagian, atau proses yang masih

potensial untuk dilakukan penghematan biaya.

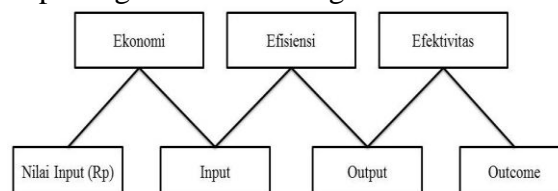
efektivitas berfokus pada *outcome* atau hasil (Mahmudi, 2015).

Value for Money

Value for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu:

1. Ekonomis merupakan perolehan input dengan kualitas dan kuantitas dengan harga terendah. Ekonomis berkaitan dengan pengkonversian input primer berupa sumber daya keuangan (uang/kas) menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Ekonomis berhubungan dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan untuk menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimal pada input tertentu dengan penggunaan terendah untuk mencapai target, maka efisiensi perbandingan *output/input*. *Output* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut.
3. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Menurut (Mardiasmo, 2009) Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Efektivitas hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomis berfokus pada input dan efisiensi pada *output* atau proses, maka

Secara skematis, *Value for Money* dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Mardiasmo (2009)

Gambar 1
Skema *Value for Money*

1. Pengertian Input

Menurut (Mardiasmo, 2009) Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan, program, dan aktivitas. Input dapat juga dinyatakan dengan nilai uang, misalnya biaya dokter, harga tanah, gaji guru, dan lain sebagainya. Menurut (Mahmudi, 2015) Input dibagi menjadi dua, yaitu input primer dan input sekunder. Input primer adalah kas, sedangkan input sekunder adalah bahan baku, orang, infrastruktur, dan masukan lainnya yang digunakan untuk proses menghasilkan *output*. Input primer harus dirubah menjadi input sekunder, contohnya agar dapat melakukan proses belajar mengajar pada universitas, maka membutuhkan input berupa dosen dan infrastruktur berupa ruang kuliah, papan tulis dan lain sebagainya.

2. Pengukuran Input

Pengukuran input merupakan pengukuran sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu proses dalam menghasilkan *output*. Proses tersebut dapat berupa program atau aktivitas. Pengukuran input dilakukan dengan cara membandingkan input sekunder dengan input primer.

3. Pengertian *Output*

Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Contoh pada Dinas Kesehatan

meningkatnya angka harapan hidup, penurunan angka kematian bayi, dan lain sebagainya.

4. Pengukuran *Output*

Pengukuran *output* adalah pengukuran keluaran langsung suatu proses. Ukuran *output* menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas.

5. Pengertian *Outcome*

Outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. *Outcome* dikaitkan dengan tujuan (*objectives*) atau target yang hendak dicapai. Dengan demikian, *outcome* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program atau aktivitas dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan berupa target kinerja yang diinginkan, sedangkan *outcome* adalah hasil yang dicapai. Contohnya di suatu daerah A terjadi wabah penyakit demam berdarah (DB). Untuk mencegah penyebaran wabah tersebut di daerah B, maka dilakukan program vaksinasi di daerah B. hasilnya daerah B tidak terkena wabah DB. Hasil ini disebut dengan *outcome*, *output*-nya adalah banyaknya orang yang diberi vaksinasi, sedangkan *input*-nya adalah dokter, tenaga medis, obat vaksinasi dan peralatan medis.

6. Pengukuran *Outcome*

Tujuan pengukuran *outcome* adalah untuk mengukur nilai dari suatu aktivitas atau program. Jika pengukuran *output* lebih bersifat mengukur kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu aktivitas, maka pengukuran *outcome* mengukur nilai kualitas dari *output* tersebut. Kualitas *output* artinya dampak terhadap masyarakat. Pengukuran *outcome* tidak dapat dilakukan sebelum hasil yang diharapkan dari suatu program atau

Tabel 2. Pengukuran Rasio dan Kriteria

No	Jenis Rasio	Formula	Keterangan	Kriteria
1.	Rasio Ekonomis	$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$	<i>Input</i> : Realisasi anggaran APBD Nilai <i>Input</i>	< 100% berarti ekonomis; sama dengan

aktivitas ditetapkan, karena pengukuran *outcome* berupa perbandingan hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan.

Penelitian yang dilakukan untuk menganalisis kinerja pemerintah dengan konsep *Value for Money* telah cukup banyak dilakukan. Analisis kinerja dengan konsep *Value for Money* dilakukan pada berbagai tingkatan pemerintahan mulai dari dinas kota/kabupaten, pemerintah kota/kabupaten, unit kerja BLU dan lain sebagainya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dengan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya. Objek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.

Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang didasarkan pada perhitungan untuk mengetahui tingkat rasio. Pengukuran rasio dan kategori rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja melalui konsep analisis *Value for Money* yang dikembangkan dalam keuangan (Mardiasmo, 2010) disajikan dalam tabel berikut:

No	Jenis Rasio	Formula	Keterangan	Kriteria
			: Anggaran APBD	100% berarti ekonomi seimbang; > 100% berarti tidak ekonomis.
2.	Rasio Efisiensi	Efisiensi = $\frac{Output}{Input} \times 100\%$	<i>Output</i> : Persentase capaian anggaran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru <i>Input</i> : Persentase capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	< 100% berarti efisien; sama dengan 100% berarti efisiensi seimbang; >100% berarti tidak efisien
3.	Rasio Efektivitas	Efektivitas = $\frac{Outcome}{Output} \times 100\%$	<i>Outcome</i> : Persentase realisasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru <i>Output</i> : Persentase target kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	< 100% berarti tidak efektif; sama dengan 100% berarti efektivitas seimbang; >100% berarti efektif.

Sumber: Mardiasmo (2010), Purwiyanti (2017)

HASIL

Berikut ini analisis *Value for Money* yang peneliti lakukan menggunakan tiga pengukuran:

1. Ekonomis

Pengukuran ekonomis membutuhkan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Untuk mencocokkan seberapa besar tingkat ekonomis suatu anggaran berdasarkan pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Secara matematis, ekonomis merupakan perbandingan antara input dengan nilai rupiah untuk memperoleh input tersebut. Berikut ini formula untuk pengukur tingkat ekonomis menurut (Mahmudi, 2015):

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Input : Realisasi anggaran APBD
Nilai Input : Anggaran APBD

Analisis perhitungan ekonomis untuk program-program lainnya pada tahun 2018 akan ditampilkan berikut: Diketahui rasio ekonomis untuk masing-masing program pada tahun 2018, dimana pada tahun 2018 seluruh program pada Diskes Kota Pekanbaru memiliki rasio ekonomis dibawah 100% (ekonomis) yang artinya Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dapat melakukan penghematan atas anggaran biaya yang telah dianggarkan. Pada tahun 2019 diketahui terdapat 22 (dua puluh dua) program kerja yang masuk kedalam kategori ekonomis, selanjutnya ada 1 (satu) program kerja yang masuk kedalam golongan ekonomis berimbang karena memiliki persentase sama dengan 100%. Secara keseluruhan pada tahun 2019 jika dilihat berdasarkan realisasi belanja maka dapat dikatakan pelaksanaan anggaran belanja tersebut ekonomis artinya Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mampu melakukan penghematan belanja dengan target yang dicapai. Pada tahun 2020 terdapat 19 (sembilan belas) program kerja pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang masuk kedalam kategori ekonomis yang memiliki persentase dibawah 100%. Selanjutnya terdapat 2 (dua) program yang

masuk kategori ekonomis berimbang. Rasio ekonomis mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 10,98% dibanding tahun sebelumnya, hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan realisasi biaya dari target yang telah ditentukan.

2. Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Apabila semakin besar *output* dibandingkan *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan input atau dengan istilah lain *output per input*. Berikut ini formula untuk pengukuran efisiensi:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Output : Persentase capaian anggaran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Input : Persentase capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Diketahui program kerja yang termasuk kedalam kategori efisien berjumlah 22 (dua puluh dua) program karena memiliki persentase efisiensi diatas 100%, selanjutnya terdapat 1 (satu) program kerja yang termasuk kedalam kategori kurang efisien karena output nya lebih kecil dibandingkan dengan input, adapun yang termasuk program kerja tidak efisien yaitu manajemen dan informasi kesehatan. Pada tahun 2019, terdapat program kerja yang masuk kedalam kategori tidak efisien yaitu sebanyak 5 (lima) program, selanjutnya yang termasuk kedalam kategori efisien berimbang yaitu sebanyak 1 (satu) program, dan sebanyak 15 (empat belas) program yang termasuk ke dalam kategori efisien. Pada tahun 2020, terdapat 15 (lima belas) program pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang termasuk dalam kategori efisien, selanjutnya terdapat 2 (dua) program yang termasuk kategori efisiensi berimbang, dan 4 (empat program) yang termasuk kedalam kategori tidak efisien.

3. Efektivitas

Menurut (Handoko, 2016) efektivitas

adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dinyatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya menilai apakah suatu program/kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini formula pengukuran efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome : Realisasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Output : Persentase target kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Diketahui jika hampir seluruh program kerja pada Dinas Kesehatan termasuk dalam kategori efektif, yang artinya Dinas Kesehatan dapat memperoleh pencapaian kinerja diatas persentase target. Adapun program kerja yang termasuk kedalam kategori efektif terdiri dari 22 (dua puluh dua) program, 1 (satu) program termasuk kedalam kategori tidak efektif dengan nilai rasio dibawah 100% yaitu pada program Manajemen dan Informasi Kesehatan. Pada tahun 2019, yang termasuk kedalam kategori efektif yaitu hanya 14 (empat belas) program, selanjutnya yang termasuk kedalam kategori tidak efektif sebanyak 5 (lima) program, dan sisanya sebanyak 1 (satu) program termasuk dalam kategori efektivitas berimbang. Pada tahun 2020, program yang dinilai efektif berdasarkan *Value for Money* yaitu terdiri dari 16 (enam belas) program, program yang dinilai tidak efektif yaitu sebanyak 3 (tiga) program, dan sisanya termasuk kedalam kategori efektif berimbang.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat direkap rasio ekonomis selama 3 tahun berturut-turut yaitu:

Berdasarkan tabel tersebut pada tahun 2018 rasio ekonomis sebesar 82,52% dimana persentase tersebut masuk kedalam kategori ekonomis, menurut laporan kinerja Diskes Kota Pekanbaru pada tahun 2018

keekonomisan yang terjadi pada tahun 2018 disebabkan karena adanya beberapa program yang tidak terlaksana atau pelaksanaannya tidak maksimal, misalnya pada program pengendalian penyakit tidak tertular dimana pada program tersebut memiliki 5 (lima) kegiatan yang ditargetkan namun yang berhasil terlaksanakan yaitu hanya 2 (dua) program. Selanjutnya pada tahun 2019 secara keseluruhan kinerja atas program yang telah dianggarkan pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru termasuk kedalam kategori ekonomis, pada tahun 2019 kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mengalami peningkatan yang dilihat dari menurunnya persentase rasio ekonomis. Dimana pada tahun 2019 seluruh kegiatan atau program mampu terlaksana hampir seluruhnya dengan memaksimalkan penggunaan anggaran, namun yang menjadi permasalahan pada tahun 2019 yaitu tidak cairnya anggaran dari pihak pusat sehingga pihak Diskes Kota Pekanbaru tidak dapat melanjutkan beberapa kegiatan yang telah direncanakan.

Selanjutnya pada tahun 2020 kinerja Dinas Kesehatan mengalami penurunan karena rasio ekonomis mengalami kenaikan sebesar 10,98%. Rasio ekonomis digunakan untuk mengukur penghematan belanja yang dilakukan suatu organisasi, dimana jika semakin tinggi realisasi belanja maka semakin tidak ekonomis karena instansi atau organisasi tersebut tidak dapat menggunakan dana anggaran belanja sehemat mungkin. Pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru memiliki 2 (dua) jenis biaya, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung contohnya seperti gaji pegawai, belanja perlengkapan administrasi, dan lain sebagainya, sedangkan belanja tidak langsung seperti belanja yang dikeluarkan untuk operasional program-program kerja yang telah dianggarkan.

Menurut (Bastian, 2010) efisiensi dapat diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Apabila semakin besar *output* dibandingkan *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Adapun

rekap hasil perhitungan rasio efisiensi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu:

Diketahui jika pada tahun 2018 dari 21 (dua puluh satu) program kerja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik dan jika dilihat berdasarkan hasil pengukuran menggunakan rasio efisiensi kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru pada tahun 2018 dikatakan tidak efisien karena memiliki persentase dibawah 100% yang artinya dinas kesehatan kota pekanbaru tidak mampu melaksanakan program yang di targetkan pemerintah dengan realisasi anggaran belanja yang ada untuk memperoleh output atau capaian kerja yang telah ditargetkan. Selanjutnya pada tahun 2019, kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dikatakan tidak efisien karena memiliki rasio dibawah 100%, dimana terdapat pelaksanaan program yang tidak mencapai target dengan anggaran belanja yang besar. Sedangkan pada tahun 2020, rasio efisiensi dikatakan efisien, namun jika dibandingkan dengan tahun 2018, pada tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru banyak menunda program kerja yang telah dianggarkan dan mengalihkan dana tersebut ke dana alokasi khusus untuk pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020, sehingga Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru merevisi anggaran yang telah dianggarkan dan lebih mengutamakan anggaran COVID-19 sehingga dana anggaran belanja yang terealisasi jauh dibawah anggaran.

Menurut (Handoko, 2016) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dinyatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya menilai apakah suatu program/ kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan pengukuran rasio efektivitas, dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Dilihat jika hasil perhitungan rasio efektivitas pada tahun 2018 menunjukkan hasil yang efektif, begitu juga tahun 2019

yang menunjukkan rasio efektifitas. Namun jika dilihat dari kenaikan ataupun penurunan rasio diketahui jika pada tahun 2019 terjadi penurunan rasio efektivitas pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sebesar 10,29%, dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan rasio efektivitas dengan persentase rasio sebesar 7,26%. Analisis efektivitas merupakan rasio untuk menilai keberhasilan program kerja dan target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas maka kinerja suatu instansi juga semakin baik. Terjadinya penurunan rasio efektivitas pada tahun 2019 dan tahun 2020 yaitu disebabkan adanya program kerja yang tidak terlaksana yang menyebabkan target tidak tercapai, mengingat pada tahun 2020 telah terjadi pandemi yang menyebabkan tertundanya program-program kerja yang telah ditetapkan, sehingga pencapaian kinerja menjadi menurun..

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru jika dilihat dari rasio ekonomis maka dapat disimpulkan jika selama 3 (tiga) tahun terakhir dikatakan ekonomis karena memiliki persentase rasio dibawah 100%. Dimana pada tahun 2018 diperoleh rasio ekonomis sebesar 82,52%, tahun 2019 sebesar 60,76%, dan tahun 2020 sebesar 71,74%.
2. Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru jika dilihat dari rasio efisiensi maka dapat disimpulkan jika selama 2 tahun berturut-turut yang dinilai tidak efisiensi yaitu pada tahun 2018 dan 2019 dimana persentase rasio efektivitas pada tahun 2018 yaitu sebesar 80,92% dan pada tahun 2019 sebesar 94,36% sedangkan kinerja yang dikatakan efisien yaitu pada tahun 2020 yang memiliki persentase 106,60%.

3. Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020 dikatakan efektif karena memiliki rasio efektivitas diatas 100% yang artinya pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mampu melaksanakan anggaran dengan pencapaian maksimal. Adapun rasio efektivitas pada tahun 2018 yaitu sebesar 120,67%, tahun 2019 sebesar 110,38, dan tahun 2020 sebesar 117,64%.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan Dinkes Kota Pekanbaru berdasarkan konsep *Value for Money*. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah lain sekaligus menginvestigasi factor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah.

DAFTAR RUJUKAN

Bastian, Indra, 2010, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta, Erlangga.

Febrianita, R. Y., Utomo, R. P., Musviyanti. 2019 . Implementasi *Value for Money* Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*. Vol.4 (2)

Dwinanda, Yosie. 2018. *Analisis Value for Money dalam pengukuran kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta*. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.

Handoko, 2016, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, BPFE.

Mahmudi, 2015, *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.

Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, Andi.

Oktafiani, Putri. 2021. Penerapan Konsep *Value for Money* dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada RSUD Brebes. Diploma Thesis, Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Perdana, T. A., Budiantoro, R. A., Putra, F. I. F. S . 2020. Mengukur Kinerja APBD Kota Surabaya Analisis *Value for Money*. *Inovasi*. 339-346. Vol.16 (2)

Purwiyanti, Dewi. 2017. Analisis Kinerja Berbasis Konsep *Value for Money* pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu), *Katalogis* 190-200. Vol.5(3)